

PELUANG DAN TANTANGAN PEKERJA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF SDGS 8 DI INDONESIA

Ilma Hanifa^{1*}, Kaymeeloa Vipassana Ramadhani², Firre An Suparapto³, Indah Prabawati⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

02-07-2026

Disetujui:

08-07-2026

Dipublikasi:

01-08-2026

Kata Kunci:

Pekerja Digital; Media Sosial; SDGs 8; Kebijakan Publik; Platform Economy

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan melalui berkembangnya ekosistem kerja berbasis media sosial di Indonesia. Perkembangan tersebut menciptakan berbagai peluang ekonomi baru, sekaligus menghadirkan tantangan terhadap terwujudnya pekerjaan yang layak (*decent work*). Penelitian ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan pekerja digital berbasis media sosial serta implikasinya terhadap kebijakan publik dalam perspektif SDGs 8. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis melalui sintesis berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memperluas akses terhadap peluang kerja melalui rendahnya hambatan memasuki pasar kerja digital, diversifikasi sumber pendapatan, dan pemberdayaan UMKM berbasis digital yang sejalan dengan target SDGs 8.3 dan 8.6. Namun demikian, pekerja digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain ketidakstabilan pendapatan akibat ketergantungan pada algoritma platform, risiko kelelahan psikologis (*burnout*), serta belum optimalnya perlindungan hukum dan jaminan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif melalui penguatan regulasi ketenagakerjaan digital, peningkatan kapasitas digital masyarakat, serta tata kelola kolaboratif antara pemerintah, perusahaan platform, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pencapaian SDGs 8 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan, terutama melalui perkembangan berbagai platform media sosial yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang aktivitas ekonomi. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang sebelumnya tidak banyak dikenal dalam sistem ketenagakerjaan konvensional. Dalam penelitian ini, pekerja digital dipahami sebagai individu yang memanfaatkan platform digital sebagai media utama untuk memperoleh penghasilan, seperti *content creator*, *freelancer*, pelaku *affiliate marketing*, maupun pelaku usaha berbasis media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang membuka peluang kerja bagi berbagai kelompok masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan pekerja digital berlangsung seiring dengan tingginya penetrasi penggunaan media sosial. Kompas.com (2025) melaporkan bahwa jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia telah mencapai lebih dari 160 juta orang sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar platform tersebut di dunia. Besarnya jumlah pengguna tidak hanya menunjukkan tingginya konsumsi konten digital, tetapi juga mencerminkan terbentuknya ekosistem kerja yang melibatkan berbagai profesi baru, seperti kreator konten, live streaming host, afiliator pemasaran, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber utama maupun tambahan pendapatan.

Perkembangan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 8 yang menekankan pentingnya penciptaan pekerjaan layak (decent work) dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi struktur pasar kerja. Srnicek (2021) melalui konsep platform economy menjelaskan bahwa platform digital telah berkembang menjadi infrastruktur ekonomi baru yang membentuk pola hubungan kerja, mekanisme distribusi pendapatan, serta relasi antara pekerja dan penyedia platform.

Di satu sisi, pekerjaan digital menawarkan berbagai peluang, seperti fleksibilitas waktu kerja, rendahnya hambatan memasuki pasar kerja, serta beragam sumber pendapatan melalui aktivitas content creation, affiliate marketing, endorsement, maupun pemasaran digital. Karakteristik tersebut menjadikan pekerjaan berbasis media sosial semakin diminati, khususnya oleh generasi muda yang memiliki tingkat adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi pekerja digital, antara lain ketidakpastian pendapatan, ketergantungan terhadap algoritma platform, tekanan untuk mempertahankan produktivitas konten, serta belum optimalnya perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan (ILO, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan pekerjaan yang memenuhi prinsip decent work.

Berbagai penelitian mengenai pekerja digital telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pemasaran digital, komunikasi, perilaku konsumen, maupun strategi pengembangan konten. Kajian yang menempatkan pekerja digital sebagai isu kebijakan publik, khususnya dengan mengaitkan peluang ekonomi, tantangan struktural, dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs 8, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk memahami bagaimana perkembangan ekonomi berbasis platform tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang memerlukan respons kebijakan publik yang lebih adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan pekerja digital berbasis media sosial serta implikasinya terhadap kebijakan publik dalam perspektif SDGs 8. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Administrasi Publik mengenai dinamika ekonomi platform dan kebijakan ketenagakerjaan digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjamin perlindungan bagi pekerja digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena pekerja digital berbasis media sosial melalui interpretasi kritis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian

berupaya menjelaskan keterkaitan antara perkembangan ekonomi digital, dinamika pekerja digital, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dalam perspektif SDGs 8. Pendekatan studi kepustakaan dipandang sesuai karena fokus penelitian terletak pada sintesis konsep, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu pekerja digital (Creswell, 2017).

Sumber data penelitian berupa dokumen sekunder yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan keterkinian informasi. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga nasional maupun internasional seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan International Labour Organization (ILO), dokumen kebijakan, buku ilmiah, serta pemberitaan media daring yang memiliki reputasi baik. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan konten publik dari sejumlah kreator digital sebagai ilustrasi empiris untuk memperkaya pembahasan mengenai pengalaman pekerja digital. Penggunaan konten tersebut tidak dimaksudkan sebagai data primer, melainkan sebagai pendukung interpretasi terhadap temuan yang diperoleh dari kajian literatur.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis dengan tahapan mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan pekerja digital, kemudian mensintesiskan berbagai temuan dari literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari berbagai jenis referensi, seperti artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, dokumen kebijakan, dan sumber pendukung lainnya. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan bias interpretasi dalam penyusunan hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis mengenai dinamika pekerja digital berbasis media sosial dalam perspektif SDGs 8 yang mencakup tiga aspek utama, yaitu peluang ekonomi, tantangan struktural, dan implikasi kebijakan publik. Analisis disusun berdasarkan sintesis berbagai literatur yang relevan dan diperkaya dengan ilustrasi empiris dari pengalaman sejumlah kreator digital Indonesia sebagai pendukung untuk menggambarkan praktik kerja digital dalam konteks nyata. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya mengidentifikasi karakteristik pekerja digital, tetapi juga menjelaskan implikasinya terhadap pencapaian pekerjaan layak (decent work) dalam kerangka SDGs 8.

Peluang Pekerja Digital di Media Sosial dalam Perspektif SDGs 8

Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang dari sekadar sarana komunikasi menjadi ruang ekonomi digital yang membuka berbagai peluang kerja bagi masyarakat. Kemudahan akses terhadap platform digital memungkinkan individu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa memerlukan modal besar maupun persyaratan formal sebagaimana pasar kerja konvensional. Laporan Kompas.com (2025) mencatat bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 160 juta orang, yang menunjukkan besarnya potensi pasar digital sebagai ruang berkembangnya berbagai bentuk pekerjaan berbasis platform. Dalam perspektif platform economy, kondisi tersebut mencerminkan demokratisasi akses terhadap pasar kerja digital melalui pemanfaatan teknologi sebagai infrastruktur ekonomi baru (Smicek, 2021). Perkembangan ini selaras dengan SDGs 8, khususnya target 8.3 yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif, kewirausahaan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Salah satu peluang utama terletak pada rendahnya hambatan untuk memasuki pasar kerja digital. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memungkinkan masyarakat memulai aktivitas ekonomi hanya dengan memanfaatkan perangkat telepon genggam dan akses internet. Kondisi tersebut memperluas kesempatan memperoleh penghasilan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. DataReportal (2025) menunjukkan bahwa tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menciptakan pasar digital yang besar sehingga memperluas peluang monetisasi melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis platform.

Selain membuka akses kerja baru, media sosial juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi. Priyono dan Sari (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan TikTok mampu meningkatkan jangkauan pasar UMKM secara signifikan, sementara Ardiyono dkk. (2024) menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi kanal utama dalam strategi pemasaran digital. Dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 65 juta unit, transformasi digital pada sektor ini tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana menjadi salah satu sasaran SDGs 8.

Peluang lainnya terlihat dari tingginya partisipasi generasi muda dalam ekonomi digital. Nugroho & Arifin (2025) menunjukkan bahwa kelompok milenial dan Generasi Z merupakan aktor dominan dalam pemanfaatan platform digital sebagai sumber pendapatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga menjadi alternatif pasar kerja yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi kaum muda. Fenomena ini sejalan dengan target SDGs 8.6 yang menekankan pentingnya pengurangan proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, or Training/NEET).

Secara keseluruhan, berbagai peluang tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi infrastruktur ekonomi digital yang memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi. Rendahnya hambatan masuk, meningkatnya digitalisasi UMKM, serta tingginya partisipasi generasi muda mengindikasikan bahwa platform digital memiliki potensi besar dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif. Namun demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pekerjaan yang layak (decent work), karena perluasan akses kerja belum selalu diikuti oleh kepastian pendapatan, perlindungan sosial, maupun jaminan kerja yang memadai.

Tantangan Struktural Pekerja Digital

Di balik berbagai peluang yang ditawarkan media sosial, pekerja digital juga menghadapi sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat terwujudnya pekerjaan yang layak (decent work). Berbeda dengan hubungan kerja konvensional yang umumnya memiliki kepastian mengenai upah, perlindungan sosial, dan hubungan kerja yang jelas, pekerjaan berbasis platform cenderung menempatkan pekerja pada posisi yang lebih rentan terhadap perubahan mekanisme platform. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap pekerjaan digital tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan pekerja terhadap algoritma platform digital. Perubahan algoritma yang mengatur distribusi konten dapat secara langsung memengaruhi tingkat visibilitas, jangkauan audiens, serta pendapatan yang diperoleh kreator. Dalam perspektif platform economy, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara pekerja digital dan penyedia platform, di mana kendali terhadap mekanisme pasar lebih banyak berada pada platform dibandingkan pekerja itu sendiri (Srnicek, 2021). Putri dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa perubahan algoritma menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja digital, meskipun mereka memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

Selain ketidakpastian pendapatan, pekerja digital juga menghadapi tekanan psikologis yang tidak kalah besar. Tuntutan untuk terus menghasilkan konten yang menarik, mempertahankan konsistensi unggahan, mengikuti tren yang terus berubah, serta memenuhi ekspektasi audiens menyebabkan pekerjaan digital memiliki intensitas kerja yang tinggi. Hapsari dkk. (2025) menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi memunculkan digital fatigue maupun burnout, terutama pada pekerja yang menjadikan media sosial sebagai sumber pendapatan utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu kerja yang sering dipandang sebagai keunggulan pekerjaan digital tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.

Dalam perspektif SDGs 8, tantangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital belum sepenuhnya memenuhi prinsip decent work. SDGs 8 tidak hanya menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, tetapi juga kualitas pekerjaan yang menjamin keamanan, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi (ILO, 2015). Dengan demikian, keberhasilan ekonomi digital tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah pekerja digital, tetapi juga dari sejauh mana sistem kerja yang berkembang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pelakunya.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya paradoks dalam perkembangan ekonomi digital. Di satu sisi, platform digital berhasil memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara lebih fleksibel. Namun, di sisi lain, fleksibilitas tersebut disertai dengan pergeseran berbagai risiko ekonomi dan psikologis kepada pekerja. Dengan kata lain, semakin terbuka akses terhadap pekerjaan digital, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap pekerja.

Temuan Empiris dari Konten Kreator Digital

Untuk memperkuat hasil sintesis literatur, penelitian ini juga menelaah konten yang dipublikasikan oleh sejumlah kreator digital Indonesia sebagai ilustrasi empiris mengenai pengalaman bekerja di media sosial. Data tersebut tidak digunakan sebagai data primer, melainkan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan bagaimana dinamika peluang dan tantangan yang ditemukan dalam literatur tercermin dalam praktik kerja digital sehari-hari.

Tabel 1.

Ringkasan Pengalaman Pekerja Digital Berbasis Media Sosial

Kreator / Platform	Peluang	Tantangan
Ria Ricis (YouTube; TikTok; Instagram)	Pendapatan tinggi dari AdSense, endorsement, dan kolaborasi brand	Tekanan konsistensi konten dan ekspektasi publik tinggi (balinewsweek.id)
Fadhil Jaidi (YouTube; TikTok; Instagram)	Engagement tinggi dan peluang kerja sama brand ternama	Tuntutan menjaga relevansi di tengah perubahan tren (Sribu.com)
Fuji Utami Putri (TikTok; Instagram)	Monetisasi digital sebagai beauty creator dengan niche spesifik	Tekanan standar audiens dan risiko burnout (KapanLagi.com)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengalaman pekerja digital menunjukkan karakteristik yang bersifat dualistik. Di satu sisi, media sosial menyediakan berbagai peluang monetisasi melalui pendapatan dari AdSense, endorsement, kolaborasi merek, maupun aktivitas ekonomi digital lainnya. Kemudahan akses tersebut memperlihatkan bahwa platform digital mampu menciptakan alternatif sumber penghasilan yang relatif fleksibel bagi masyarakat.

Namun demikian, peluang ekonomi tersebut juga diiringi oleh berbagai tekanan kerja. Tuntutan untuk mempertahankan konsistensi produksi konten, menjaga keterlibatan audiens, mengikuti perubahan tren, serta menghadapi komentar negatif menjadi tantangan yang terus

dihadapi para kreator digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh kreativitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme platform yang berada di luar kendali pekerja.

Temuan empiris tersebut memperkuat hasil kajian literatur yang menunjukkan bahwa ekosistem kerja digital memiliki karakter yang paradoks. Di satu sisi, platform digital membuka peluang ekonomi yang luas melalui berbagai skema monetisasi. Di sisi lain, pekerja digital menanggung berbagai risiko yang berkaitan dengan ketidakstabilan pendapatan, tekanan psikologis, dan ketidakpastian hubungan kerja. Dengan demikian, fleksibilitas yang ditawarkan ekonomi digital belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik pekerjaan layak sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 8.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pekerjaan. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, perluasan ekonomi berbasis platform justru berpotensi menciptakan bentuk kerentanan baru bagi pekerja digital. Oleh karena itu, peran negara menjadi penting dalam membangun kerangka regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi digital, kepentingan platform, dan perlindungan terhadap pekerja.

Implikasi terhadap Kebijakan Publik dalam Perspektif SDGs 8

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital melalui media sosial menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang memerlukan respons kebijakan yang lebih adaptif. Perluasan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh platform digital memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berbagai kerentanan yang dihadapi pekerja digital menunjukkan bahwa mekanisme pasar digital belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya prinsip pekerjaan layak (*decent work*) sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 8. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja digital.

Implikasi pertama berkaitan dengan perlunya pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi karakteristik pekerjaan berbasis platform. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja digital masih menghadapi ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, serta tingginya ketergantungan terhadap mekanisme algoritma platform. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka regulasi ketenagakerjaan konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika hubungan kerja digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang memberikan kepastian mengenai hak dan perlindungan dasar bagi pekerja digital tanpa menghambat inovasi ekonomi digital yang terus berkembang.

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi dan kompetensi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi manfaat tersebut lebih mudah diakses oleh individu yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Oleh sebab itu, pengembangan keterampilan digital melalui pelatihan yang inklusif menjadi penting agar peluang ekonomi digital dapat dinikmati secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan memperluas akses terhadap pekerjaan yang lebih berkualitas.

Implikasi ketiga menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengembangan ekosistem kerja digital. Kompleksitas hubungan antara pemerintah, perusahaan platform, pelaku usaha, dan pekerja digital menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak dapat dibebankan hanya kepada satu aktor. Sebaliknya, diperlukan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan standar perlindungan pekerja, meningkatkan transparansi pengelolaan platform, serta memperluas akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja digital. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menciptakan

keseimbangan antara inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap pekerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs 8 melalui penciptaan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila transformasi ekonomi digital diiringi dengan kebijakan publik yang adaptif, penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola platform yang lebih akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi digital tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pekerja digital, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memastikan bahwa setiap peluang kerja yang tercipta memenuhi prinsip pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru di Indonesia. Dalam perspektif SDGs Poin 8, perkembangan tersebut menghadirkan dua konsekuensi yang saling berkaitan. Di satu sisi, media sosial memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja melalui rendahnya hambatan memasuki pasar kerja digital, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemberdayaan UMKM dan generasi muda. Di sisi lain, pekerja digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural berupa ketidakstabilan pendapatan, ketergantungan terhadap algoritma platform, risiko burnout, serta belum optimalnya perlindungan hukum dan jaminan sosial.

Temuan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan pekerjaan yang memenuhi prinsip decent work. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian SDGs Poin 8 tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya jumlah pekerja digital, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan publik dalam menciptakan sistem perlindungan yang mampu mengimbangi perkembangan ekonomi berbasis platform. Hal ini memerlukan pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penguatan kapasitas digital masyarakat, serta pengembangan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan platform, pelaku usaha, dan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Administrasi Publik dengan menempatkan pekerja digital sebagai bagian dari isu kebijakan publik dalam konteks ekonomi platform dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan digital yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman pekerja digital serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (5th ed.). Sage Publications.
- DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.
- Hapsari, R. K. M., Nisa, M. A., & Wigati, N. A. (2025). Tantangan digital fatigue pada pekerja wanita berkelanjutan menggunakan systematic literature review. In *Proceedings of the Indonesian Conference on Occupational Safety, Health, and Environment (INCOSHET)* (Vol. 1, pp. 75–85).
- International Labour Organization. (2015). *Decent work and the 2030 agenda for sustainable development*. <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/decent-work-and-2030-agenda-sustainable-development>.

- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. <https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/report/World-Employment-and-Social-Outlook-2021/995218610802676>.
- Kompas.com. (2025). *Jumlah pengguna TikTok di Indonesia capai 160 juta*. <https://tekno.kompas.com/read/2025/07/30/14164347/pengguna-tiktok-di-indonesia-tembus-160-juta-terbanyak-di-asia-tenggara?page=all>.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nugroho, A., & Arifin, Z. (2023). Digital entrepreneurship and youth employment in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 11(2), 45–58.
- Priyono, A., & Sari, D. (2023). Social media utilization for MSME development in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 67–78.
- Putri, N. Q., Fauzia, P., & Permana, E. (2025). Analisis bisnis konten kreator sebagai alternative karir di era digital pada Gen Z di platform TikTok. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2441–2451.
- Srnicek, N. (2021). *Platform capitalism*. Polity Press.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>.